



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUMARNO, SE, MM
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

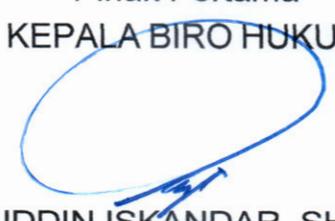
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

Pihak Pertama
KEPALA BIRO HUKUM


IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	97%
2.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah Kabupaten/Kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji.	97%
3.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas bantuan hukum.	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.	96%
4.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas Kabupaten/Kota peduli HAM.	Persentase kabupaten/kota peduli HAM.	96%
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum.	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum.	100%
	5.1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum	82,5
	5.2. Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah.	Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum	3

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Rp. 2.918.000.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 504.092.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%

Semarang, 10 Januari 2025


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

KEPALA BIRO HUKUM

IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003